

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah terjadi perubahan model pembangunan yang tersentralisasi menjadi model pembangunan yang terdesentralisasi. Tujuan dari adanya pergerakan ini yaitu untuk mempromosikan otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektivitas ekonomi, serta keadilan dalam menikmati layanan publik. Sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya untuk menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut.

Pendelegasian kewenangan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak disertai dengan adanya penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri yang dapat dilakukan dalam wadah pendapatan asli daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,serta dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah yang dapat dilakukan melalui dana perimbangan yaitu dana bagi hasil

yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Undang-Undang Nomor 33/2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan dan pengeluaran daerah yang utama. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan PADnya. Jika kontribusi PAD terhadap struktur APBD itu besar, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil. Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang mana kedua pendanaan ini berasal dari dana perimbangan. Menurut Julitawati *et al* (2012), besarnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada kenyataannya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih mengalami beberapa kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada peraturan daerah serta terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan. Di sisi lain, Febriansyah (2015) mengatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011, menyatakan bahwa sebesar 15% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berada pada level opini Tidak Memberi Pernyataan (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Hal ini menggambarkan bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga menimbulkan konsekuensi yang harus diterima oleh

pemerintah daerah, yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode selanjutnya, sehingga diperlukan upaya perbaikan kinerja keuangan daerah secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012).

Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah salah satunya yakni rasio keserasian. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012), semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2013) yang mengatakan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dan secara parsial dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Febriansyah (2015) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sementara itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2011-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

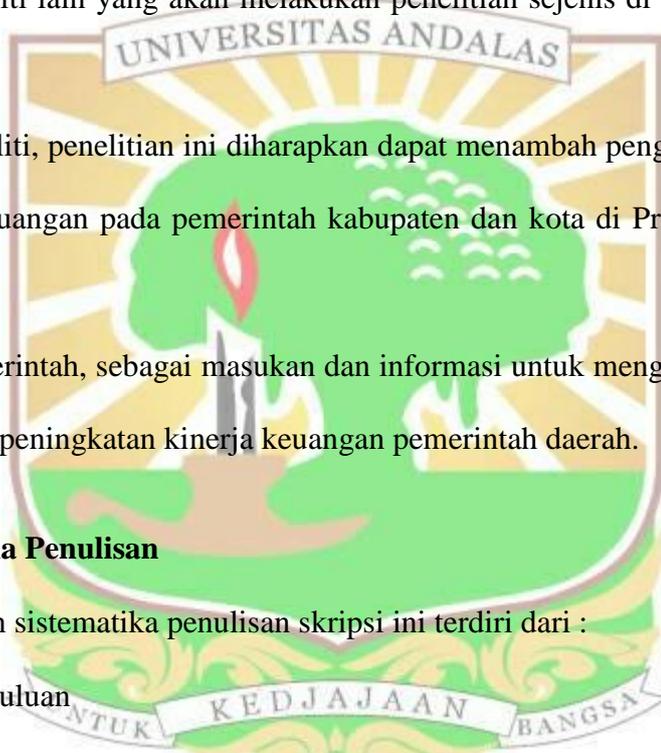
Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan pelaksanaan penelitian, ringkasan penelitian sebelumnya yang berhubungan yang telah dilakukan, dan berbagai argumentasi yang menjadi hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.



Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi objek penelitian, populasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data, analisis regresi data, pengujian hipotesis, sarana pengolahan data serta hasil yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Diikuti dengan analisis dan pembahasan yang meliputi analisis deskriptif, analisis regresi data, pembuktian hipotesis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, serta pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

